

ANALISIS KEMISKINAN DI DESA LABUAN TOPOSO KECAMATAN LABUAN KABUPATEN DONGGALA

Arie Kurniawan, Anhulaila dan Eko Jokolelono

sgkurniawanarie@gmail.com

Program Studi Magister Pembangunan Wilayah Pedesaan Pascasarjana Universitas Tadulako

Abstract

Poverty is a complex problem that occurs in almost every country, especially in a developing country like Indonesia. Data of Susenas showed that the poor in are in rural areas and majority of them depend on agriculture for their livelihood with relatively low incomes compared to residents who live in urban areas. This research intends to identify and to analyze the poverty conditions based on consumption spending on food and non-food commodities in Labuan Toposo village Labuan sub-district Donggala Regency. Method used was descriptive analysis using quantitative approach where the sample was taken trough Slovin formula. Data analysis method used was a poverty line calculation that was designed so as not to be separated from the actual BPS calculations. The result of this research revealed that the majority of the populations in Labuan Toposo village Labuan sub-district Donggala Regency still live below the poverty line.

Keywords: *Poverty Line, Poverty Conditions, Rural Area.*

PENDAHULUAN

Kemiskinan merupakan permasalahan yang mempunyai kompleksitas yang tinggi. Tingkat pendapatan, kesehatan, pendidikan, akses terhadap barang dan jasa, lokasi, geografis, gender, dan kondisi lingkungan adalah sekian banyak faktor-faktor yang saling berkaitan dan dapat mempengaruhi keadaan kemiskinan di suatu daerah. Kemiskinan dapat dilihat sebagai kelaparan ketiadaan tempat berteduh, ketidakmampuan mendapatkan pengobatan secara medis, ketiadaan akses untuk bersekolah dan buta huruf, pengangguran, kekhawatiran tentang masa depan bahkan kehidupan pada satu hari berikutnya. Tampilan kemiskinan lainnya adalah ketidakberdayaan, kehilangan aspirasi, dan kebebasan. Indonesia merupakan salah satu negara berkembang menghadapi masalah besar yang umumnya dihadapi oleh negara-negara berkembang, yaitu kelompok masyarakat berpendapatan rendah serta tingkat kemiskinan atau jumlah orang berada di bawah garis kemiskinan (*poverty line*) (Tambunan, 2001).

Data yang dikeluarkan oleh Bank Dunia dan Badan Pusat Statistik menunjukkan penurunan kemiskinan nasional secara perlahan dan konsisten. Pemerintah Indonesia menggunakan persyaratan yang tidak ketat mengenai definisi garis kemiskinan, sehingga yang tampak adalah gambaran yang lebih positif dari kenyataannya. Tahun 2016 pemerintah Indonesia mendefinisikan garis kemiskinan dengan pendapatan per bulannya (per kapita) sebanyak Rp. 354.386 (atau sekitar USD \$25) yang dengan demikian berarti standar hidup yang sangat rendah. Nilai garis kemiskinan yang digunakan Bank Dunia, mengklasifikasikan persentase penduduk Indonesia yang hidup dengan penghasilan kurang dari USD \$1.25 per hari sebagai mereka yang hidup di bawah garis kemiskinan (dengan kata lain *miskin*), maka persentasenya akan kelihatan tidak akurat karena nilainya seperti dinaikkan beberapa persen. Bank Dunia menyatakan bahwa, kalau kita menghitung angka penduduk Indonesia yang hidup dengan penghasilan kurang dari USD \$2 per hari angkanya akan lebih meningkat lagi. Ini menunjukkan bahwa

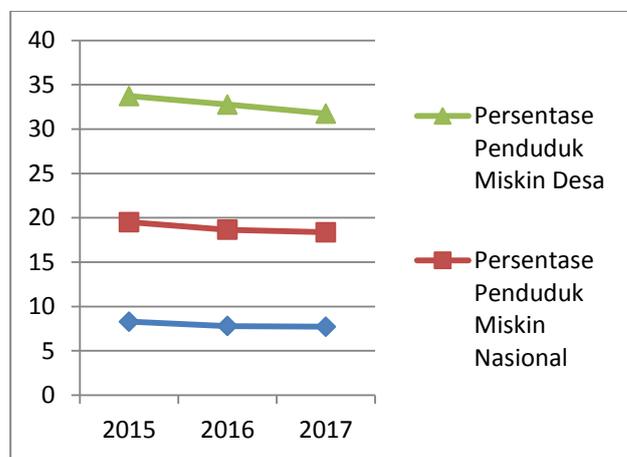
sebagian besar penduduk Indonesia hidup hampir di bawah garis kemiskinan.

Provinsi Sulawesi Tengah adalah salah satu provinsi di Pulau Sulawesi yang berpenduduk 2.876.007 juta jiwa. Provinsi ini mempunyai angka *gini ratio* yang cukup tinggi dan mencapai angka tertinggi pada Maret 2013, sebesar 0,407. Pada September 2015 mulai turun dan terus menurun. Dan BPS merilis, hingga September 2016 angka *gini ratio* Sulteng mencapai angka 0,347. Berdasarkan daerah tempat tinggal, *gini ratio* di daerah perkotaan pada September 2016 tercatat sebesar 0,372. Angka ini menurun sebesar 0,015 poin dibanding bulan Maret 2016 yang sebesar 0,387. Dan menurun sebesar 0,043 poin dibanding bulan September 2015 yang sebesar 0,415. Persentase kemiskinan di Provinsi Sulawesi Tengah mencapai angka 14,09% dalam perspektif nasional tahun 2016. Persentase ini masih tergolong tinggi jika di dibandingkan dengan provinsi lainnya yang ada di Pulau Sulawesi terkecuali Provinsi Gorontalo yang mencapai persentase sebanyak 17,63%. Penduduk miskin Sulawesi Tengah merupakan yang paling tinggi kedua di Pulau Sulawesi setelah Provinsi Gorontalo ((BPS Sulteng, 2016). Penduduk miskin di Sulteng dihitung berdasarkan kemampuan daya beli setiap penduduk terhadap kebutuhan pokok makanan dan non makanan. Menurutnya, garis kemiskinan Sulteng untuk September 2016 ditetapkan sebesar Rp 382.774 per bulan per kapita penduduk miskin.

Menurut data BPS, Provinsi Sulawesi Tengah adalah provinsi kedua yang memiliki jumlah penduduk miskin kedua terbesar setelah Provinsi Gorontalo yang berada pada Pulau Sulawesi dan berada pada posisi yang kesembilan terbesar dalam perspektif nasional Mengacu pada pendapat Sumodiningrat (1999), kita bisa melihat bagaimana kemiskinan itu sangat erat kaitannya dengan keterisolasian dan keterbelakangan seperti yang tertera dalam data angka kemiskinan 2015-2017 oleh Badan Pusat Statistik (BPS)

Nasional bahwa persentase penduduk miskin di desa lebih besar dari penduduk miskin yang berada di kota. Laporan ini jelas menjadi cermin, bahwa daerah-daerah yang belum sepenuhnya tertangani dan jauh dari akses pembangunan sangat rentan menjadi kantong-kantong kemiskinan.

Mengacu pada pendapat Sumodiningrat (1999), kita bisa melihat bagaimana kemiskinan itu sangat erat kaitannya dengan keterisolasian dan keterbelakangan seperti yang tertera dalam data angka kemiskinan 2015-2017 oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Nasional bahwa presentase persentase penduduk miskin di desa lebih besar dari penduduk miskin yang berada di kota. Laporan ini jelas menjadi cermin, bahwa daerah-daerah yang belum sepenuhnya tertangani dan jauh dari akses pembangunan sangat rentan menjadi kantong-kantong kemiskinan. Berikut ini adalah gambar jumlah dan persentase penduduk miskin menurut daerah, yang bersumber dari data Badan Pusat Statistik (BPS) Nasional.



Kemiskinan di pedesaan hampir sepenuhnya melekat pada kegiatan pertanian rakyat. Berdasarkan data statistik Susenas, sebanyak 63,20 % dari jumlah total penduduk miskin Indonesia berada di pedesaan dan lebih kurang 57% dari total penduduk Indonesia menggantungkan hidup pada sektor pertanian, dengan tingkat pendapatan yang relatif rendah jika dibandingkan dengan

penduduk yang tinggal di perkotaan. Perbedaan pendapatan tersebut berkaitan erat dengan produktivitas para petani Indonesia yang tidak dapat dilepaskan dari berbagai faktor, antara lain luas lahan yang dimiliki, kebijakan pemerintah dalam hal pemberian insentif kepada petani dan tidak meratanya penguasaan aset (Berita Resmi Statistik BPS, 2011). Untuk itu pertanyaan penelitian yang dibangun adalah, bagaimana kondisi kemiskinan berdasarkan pengeluaran konsumsi komoditi makanan dan komoditi non makanan di Desa Labuan Toposo Kecamatan Labuan Kabupaten Donggala.

Berikut ini adalah tabel yang menunjukkan angka kemiskinan menurut daerah dari tahun 2001-2017.

Tahun	Persentase Penduduk Miskin		
	Kota	Desa	Kota+ Desa
2001	9.79	24.84	18.41
2002	14.46	21.1	18.2
2003	13.57	20.23	17.42
2004	12.13	20.11	16.66
2005	11.68	19.98	15.97
2006	13.47	21.81	17.75
2007	12.52	20.37	16.58
2008	11.65	18.93	15.42
2009	10.72	17.35	14.15
2010	9.87	16.56	13.33
Maret 2011	9.23	15.72	12.49
Sep-11	9.09	15.59	12.36
Maret 2012	8.78	15.12	11.96
Sep-12	8.6	14.7	11.66
Maret 2013	8.39	14.32	11.37
Sep-13	8.52	14.42	11.47
Maret 2014	8.34	14.17	11.25
Sep-14	8.16	13.76	10.96
Maret 2015	8.29	14.21	11.22

Sep-15	8.22	14.09	11.13
Maret 2016	7.79	14.11	10.86
Sep-16	7.73	13.96	10.7
Maret 2017	7.72	13.93	10.64

Sumber: Berita Resmi Statistik, 2017

Kemiskinan di pedesaan hampir sepenuhnya melekat pada kegiatan pertanian rakyat. Berdasarkan data statistik Susenas, sebanyak 63,20 % dari jumlah total penduduk miskin Indonesia berada di pedesaan dan lebih kurang 57% dari total penduduk Indonesia menggantungkan hidup pada sektor pertanian, dengan tingkat pendapatan yang relatif rendah jika dibandingkan dengan penduduk yang tinggal di perkotaan. Perbedaan pendapatan tersebut berkaitan erat dengan produktivitas para petani Indonesia yang tidak dapat dilepaskan dari berbagai faktor, antara lain luas lahan yang dimiliki, kebijakan pemerintah dalam hal pemberian insentif kepada petani dan tidak meratanya penguasaan aset (Berita Resmi Statistik BPS, 2011).

Pencapaian *Millenium Development Goals* (MDGs) di Indonesia, terkait dengan hal tersebut upaya penanggulangan kemiskinan telah dilakukan dengan berbagai program yang dilaksanakan secara lintas sektor/lembaga/departemen. Upaya tersebut juga dilakukan dengan pengalokasian anggaran untuk mendukung pelaksanaan berbagai program terkait. Anggaran yang dikeluarkan untuk program-program kemiskinan selama ini sangat besar. Dana tersebut sebagian bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan sebagian lagi merupakan pinjaman dari lembaga donor asing. Dari tahun ke tahun, anggaran penanggulangan kemiskinan tersebut meningkat secara signifikan. Pada tahun 2007, pemerintah telah menargetkan anggaran sebesar Rp.51 triliun atau sekitar 10% dari total APBN, kemudian pada tahun 2009 meningkat drastis lagi hingga mencapai Rp.131 triliun. Anggaran ini terkonsentrasi

pada tiga hal, yaitu perlindungan sosial dan intervensi langsung, pelayanan dasar, serta peningkatan daya beli melalui peningkatan pertumbuhan dan pematapan stabilitas harga. Namun permasalahannya adalah bahwa tidak semua anggaran untuk penanggulangan kemiskinan tersebut dapat dinikmati oleh penduduk miskin. Hal tersebut disebabkan masih banyaknya program yang belum terfokus dan menyentuh masyarakat miskin secara langsung. Hal ini turut menyebabkan target penanggulangan kemiskinan masih sulit dicapai (Tukiran. et.al, 2010 dalam Merry Christina, 2012. Hal.4). Sejak tahun 2015 pemerintah juga menggulirkan dana triliunan rupiah untuk program Dana Desa untuk mengatasi kesenjangan antara penduduk desa dan kota. Pada 2015, pemerintah menganggarkan dua puluh triliun rupiah, pada 2016 sebesar empat puluh tujuh triliun rupiah. Kemudian pada 2017 dianggarkan sebesar enam puluh triliun rupiah, dan akan kembali dikucurkan enam puluh triliun rupiah pada 2018, namun sistem dan sumber daya yang belum siap serta kurangnya pengawasan membuat anggaran dana desa banyak tidak tepat sasaran (<http://databoks.katadata.co.id>).

METODE

Penelitian secara teknis memerlukan suatu metode/jenis penelitian yang dapat membantu dan memudahkan penulis dalam memperoleh data yang diperlukan sesuai dengan tujuan penelitian. Sesuai dengan tujuan penulisan tesis ini, untuk mengetahui dan menganalisis kondisi kemiskinan yang terdapat di Desa Labuan Toposo Kecamatan Labuan Kabupaten Donggala berdasarkan pengeluaran konsumsi makanan dan konsumsi non makanan di daerah tersebut.

Jenis penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif, sedangkan metodenya menggunakan wawancara (*in-depth interview*) yaitu wawancara mendalam menggunakan pedoman wawancara (kuisisioner).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Deskripsi Obyek Penelitian

Kecamatan Labuan adalah kecamatan yang terletak di sentral Kabupaten Donggala yang dibagi dalam tujuh desa. Secara geografis terletak pada 0°33'02"LS-0°41'27"LS dan 120°00'07BT-119°48'37"BT. Batas-batas wilayah administrasi Kecamatan Labuan adalah sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Sindue.
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Parigi Moutong.
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Tanantovea.
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Teluk Palu.

Kepadatan penduduk Kecamatan Labuan pada akhir tahun 2015 tercatat 112 jiwa/km², dengan luas wilayah 126,01 km².

Deskripsi Karakteristik Responden

Deskripsi karakteristik responden dalam penelitian ini meliputi aspek jenis kelamin, status perkawinan, tingkat pendidikan terakhir, jenis pekerjaan, dan jumlah anggota keluarga. Total responden dalam penelitian ini adalah 89 responden (Kepala Keluarga). Berdasarkan analisis data atas dasar 89 responden (Kepala keluarga) maka dapat diperoleh gambaran tentang karakteristik responden dilihat dari jenis kelamin, status perkawinan, tingkat pendidikan, jenis pekerjaan, dan jumlah anggota keluarga sebagai berikut :

1. Dari total responden sebanyak 89 orang, yang menjadi responden semuanya adalah laki-laki yaitu kepala rumah tangga.
2. Status perkawinan dari 89 responden adalah seluruhnya sudah menikah.
3. Dari total 89 responden tingkat pendidikan terakhir adalah 8 responden (9%) tidak bersekolah, 40 responden (44,9%) tamat SD, 29 responden (32,5%) tamat SLTP, dan 12 responden (13,5%) tamat SLTA.

4. Dari total responden sebanyak 89 orang yang bekerja sebagai buruh bangunan sebanyak 3 orang (3,4%), buruh tani sebanyak 52 orang (58,4%), dan petani 34 orang (37,8%)

Garis Kemiskinan Konsumsi

Garis kemiskinan konsumsi (*consumption-based poverty line*) adalah salah satu perhitungan kemiskinan yang selama ini digunakan oleh BPS (Badan Pusat Statistik) dalam menghitung penduduk miskin di Indonesia. Pendekatan garis kemiskinan konsumsi terdiri dari garis kemiskinan makanan (batas kecukupan konsumsi makanan) dan garis kemiskinan non makanan (batas kecukupan konsumsi non makanan).

Pertama kali yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendataan terhadap konsumsi masing-masing rumah tangga terhadap makanan per hari. Setelah diketahui berapa konsumsi mereka per hari, selanjutnya jumlah konsumsi pengeluaran mereka (rupiah) tersebut disetarakan dengan 2100 kilokalori dengan mengalikan 2100 terhadap jumlah tanggungan masing-masing keluarga. Kemudian untuk menghitung harga kalori pada masing-masing keluarga, jumlah pengeluaran makanan dalam 1 hari dibagi dengan jumlah kebutuhan kalori perkapita per hari. Selanjutnya, untuk mendapatkan pengeluaran makanan per bulan maka jumlah pengeluaran makanan dalam 1 hari dikalikan dengan 30 (jumlah hari dalam sebulan). Untuk mendapatkan pengeluaran makanan perkapita per bulan maka, pengeluaran makanan per bulan dibagi dengan jumlah tanggungan pada masing-masing keluarga. Untuk mendapatkan pengeluaran makanan perkapita per hari maka, pengeluaran makanan perkapita per bulan dibagi dengan 30 (jumlah hari dalam sebulan). Untuk menentukan GKM (Garis Kemiskinan Makanan) perkapita per hari adalah rata-rata (*average*) pengeluaran konsumsi makanan perkapita per hari. Identifikasi miskin dapat dilakukan apabila kita telah mendapatkan

GKM perkapita per hari yaitu Rp.7065,32. GKM perkapita per bulan yaitu Rp.211.959, merupakan rata-rata (*average*) pengeluaran konsumsi makanan perkapita per bulan.

Berdasarkan data yang diperoleh, masyarakat Desa Labuan Toposo yang teridentifikasi miskin mengeluarkan sejumlah Rp.450.000,00–Rp.1.200.000,00 untuk konsumsi makanan setiap bulannya. Hal ini didasarkan pada bahan makanan yang umumnya mereka konsumsi (lihat pada lampiran) seperti beras, ikan, daging, sayur-sayuran, telur, konsumsi lainnya (mi instan, mie kering, mie bihun dan lain sebagainya), dan rokok (tembakau). Pada data (di lampiran) tersebut masyarakat Desa Labuan Toposo dapat dikelompokkan menjadi kelompok masyarakat yang berada di bawah garis kemiskinan makanan dan masyarakat yang berada di atas garis kemiskinan.

Berikut ini adalah tabel identifikasi beserta klasifikasi kemiskinan berdasarkan pengeluaran konsumsi makanan. Kolom identifikasi miskin adalah kolom yang berisi angka-angka minus yang menunjukkan bahwa seseorang itu miskin dari sisi komoditi makanan yang dihasilkan dari pengeluaran makanan perkapita perhari dikurangi dengan angka GKM yang berlaku yaitu Rp.7065,32. Sebagai contoh, penulis mengambil keluarga Ilham yang memiliki pengeluaran makanan perkapita per hari yaitu Rp.5000, untuk mendapatkan identifikasi miskin maka angka $Rp.5000 - Rp.7065,32 = Rp. -2065,329$, maka telah diketahui bahwa angka dalam kolom identifikasi miskin adalah pengurangan pengeluaran perkapita per hari dengan angka GKM (Garis Kemiskinan Makanan).

Nama Kepala Keluarga	Pekerjaan	Pengeluaran Perkapita Perhari	Identifikasi Miskin
Ilham	Petani Sewa	5000	-2065.32
Mustafa	Pekebun	2666,66	-4398.66
Hasyim	Petani Sewa	4200	-2865.32
Warno	Buruh Tani	4400	-2665.32
Andi	Buruh Tani	4400	-2665.32
Anas	Buruh Tani	4400	-2665.32
Taufan	Buruh Tani	4400	-2665.32
Sidiq	Buruh Tani	4400	-2665.32
Tasdi	Petani	5750	-1315.32
Mujiman	Petani	4800	-2265.32
Japara	Buruh Tani	6500	-565.32
Nduli	Buruh Tani	5200	-1865.32
Ridwan	Buruh Tani	6500	-565.32
Arwis	Petani Sewa	6500	-565.32
Anton	Petani Sewa	5200	-1865.32
Kifli	Buruh Tani	6500	-565.32
Mirdal	Petani Sewa	6500	-565.32
Sarno	Petani Sewa	6500	-565.32
Liwa	Petani Sewa	6500	-565.32
Gusti	Petani Sewa	6500	-565.32
Riswan	Petani Sewa	5200	-1865.32
Dar	Petani Sewa	4333,33	-2731.99
Domi	Buruh Tani	4333,33	-2731.99
Darma	Petani	4333,33	-2731.99
Zumran	Buruh Tani	6500	-565.32
Adin	Petani Sewa	6500	-565.32
Iwan	Buruh Tani	5200	-1865.32
Aco	Buruh Tani	5200	-1865.32
Lato	Petani	5600	-1465.32
Jupri	Petani Sewa	5600	-1465.32
Kisran	B. Bangunan	7000	-65.32
Hasnun	B. Bangunan	5600	-1465.32
Dani	B. Bangunan	5600	-1465.32
Imran	Petani Sewa	5800	-1265.32
Saransa	Buruh Tani	6000	-1065.32

Masri	Buruh Tani	6000	-1065.32
Suadi	Buruh Tani	6000	-1065.32
Lauma	Buruh Tani	6000	-1065.32
Taufik	Petani Sewa	6333,33	-731.99
Said	Petani Sewa	6666,66	-398.66
Sappara	Petani Sewa	6666,66	-398.66
Fikran	Petani	5714,28	-1351.04
Hilal	Petani	6666,66	-398.66
Wawan	Petani Sewa	6666,66	-398.66

Sumber: *Data Primer (diolah) 2018*

Tabel di atas menunjukkan kelompok yang teridentifikasi miskin disebabkan oleh konsumsi makanan yang biasa disebut GKM (Garis Kemiskinan Makanan). Kelompok ini tidak dapat memenuhi kebutuhan kalori yang dibutuhkan oleh setiap individu dalam anggota keluarganya. Klasifikasi berdasarkan jumlah pengeluaran kelompok keluarga yang diidentifikasi miskin ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Pengeluaran Konsumsi Makanan/Bulan	Jumlah Keluarga
Rp.450.000-Rp.690.000	9
Rp.720.000-Rp.870.000	25
Rp.900.000-Rp.1.200.000	10

Sumber: *Data Primer 2018*

Jumlah keluarga yang teridentifikasi miskin sebanyak 44 keluarga dengan pengeluaran konsumsi makanan yang berbeda. Menurut data, ada 9 keluarga yang mengeluarkan Rp.450.000-Rp.690.000 untuk konsumsi makanan dalam setiap bulannya dan teridentifikasi miskin karena pengeluaran tersebut belum bisa memenuhi jumlah kilokalori (kcal) yang dibutuhkan oleh setiap individu yaitu 1200 kcal. Keluarga yang pengeluaran untuk konsumsi makanannya sebesar Rp.720.000-Rp.870.000 setiap bulannya ada sebanyak 25 keluarga yang teridentifikasi miskin karena pengeluaran tersebut belum bisa memenuhi 1200

kilokalori. Masyarakat Desa Labuan Toposo yang mengeluarkan sebesar Rp.900.000-Rp.1.200.000 setiap bulannya juga ada yang teridentifikasi miskin dan tidak lain hal ini disebabkan karena pengeluaran perkapita dalam setiap harinya tidak mampu memenuhi kebutuhan kilokalori dalam setiap individu rumah tangga tersebut.

Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM) merupakan penjumlahan nilai kebutuhan minimum meliputi perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan. Nilai kebutuhan minimum per komoditi atau sub kelompok non makanan dihitung dengan menggunakan suatu rasio pengeluaran komoditi atau sub kelompok tersebut terhadap total pengeluaran komoditi atau sub kelompok yang tercatat dalam data Susenas modul konsumsi. Rasio tersebut dihitung dari hasil Survei Paket Komoditi Kebutuhan Dasar 2004 (SPKKD 2004) yang digunakan untuk mengumpulkan data pengeluaran konsumsi rumah tangga per komoditi non makanan yang lebih rinci dibandingkan data Susenas modul konsumsi. Rasio tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini:

KOMODITI	RASIO	
	Kota	Desa
Perumahan	0.7163	0.9831
Listrik	0.9948	0.8964
Air	0.9039	0.9847
Perlengkapan Mandi	0.9505	0.9500
Biaya Kesehatan	0.4811	0.6218
Biaya Pendidikan	0.6223	0.4899
BBM (Bahan Bakar Minyak)	0.7109	0.7109

Sumber : BPS Provinsi 2017

Pertama kali yang dilakukan dalam perhitungan ini, seperti halnya dalam GKM (Garis Kemiskinan Makanan) adalah pendataan terhadap konsumsi masing-masing rumah tangga dalam hal kebutuhan non makanan, setelah masing-masing nilai pengeluaran per komoditi dikalikan dengan rasio pengeluaran komoditi/sub kelompok

non makanan menurut daerah (Hasil SPKKD 2004) maka kita akan mendapatkan rasio masing-masing komoditi kebutuhan non makanan (lihat data pada lampiran). Jumlah rasio kebutuhan komoditi perbulan diketahui dengan menjumlahkan rasio komoditi perumahan komoditi listrik, komoditi air, komoditi perlengkapan mandi, komoditi kesehatan, komoditi pendidikan, dan komoditi penggunaan BBM (Bahan Bakar Minyak). Jumlah kebutuhan komoditi perkapita per bulan didapatkan dengan cara membagi jumlah rasio komoditi per bulan dengan jumlah tanggungan pada masing-masing keluarga. Jumlah kebutuhan komoditi perkapita per hari didapatkan dengan membagi jumlah kebutuhan komoditi perkapita per bulan dengan 30 (jumlah hari dalam sebulan). Untuk menentukan GKNM (Garis Kemiskinan Non Makanan) perkapita per hari adalah rata-rata (*average*) kebutuhan komoditi non makanan perkapita per hari dan untuk menentukan GKNM (Garis Kemiskinan Non Makanan) perkapita per bulan adalah rata-rata (*average*) kebutuhan komoditi non makanan perkapita perbulan. Identifikasi miskin dapat dilakukan apabila kita telah mendapatkan GKNM perkapita per hari yaitu Rp. 818,70. GKNM perkapita per bulan yaitu Rp. 24.561,26, merupakan rata-rata (*average*) pengeluaran konsumsi makanan perkapita per bulan.

Berdasarkan data yang diperoleh, masyarakat Desa Labuan Toposo yang teridentifikasi miskin mengeluarkan sejumlah Rp.54.066–Rp.132.562 untuk penggunaan komoditi non makanan setiap bulannya. Hal ini didasarkan pada komoditi non makanan yang umumnya mereka gunakan (lihat pada lampiran) seperti perumahan, listrik, air, perlengkapan mandi, kesehatan, pendidikan, dan penggunaan BBM (Bahan Bakar Minyak). Pada data (di lampiran) tersebut masyarakat Desa Labuan Toposo dapat dikelompokkan menjadi kelompok masyarakat yang berada di bawah garis kemiskinan non makanan dan masyarakat yang

berada di atas garis kemiskinan non makanan. Berikut ini adalah tabel identifikasi beserta klasifikasi kemiskinan berdasarkan pengeluaran konsumsi non makanan yang juga dilengkapi dengan kolom identifikasi miskin seperti pada tabel 4.3 sebelumnya. Kolom identifikasi miskin adalah kolom yang berisi angka-angka minus yang menunjukkan bahwa seseorang itu miskin dari sisi komoditi non makanan yang dihasilkan dari pengeluaran non makanan perkapita perhari dikurangi dengan angka GKNM yang berlaku yaitu Rp. 818,70. Sebagai contoh, penulis mengambil keluarga Mustafa yang memiliki pengeluaran non makanan perkapita per hari yaitu Rp.300,36, untuk mendapatkan identifikasi miskin maka angka Rp.300,36 – Rp.818,70 = Rp.-518,34, maka telah diketahui bahwa angka dalam kolom identifikasi miskin adalah pengurangan pengeluaran perkapita per hari dengan angka GKNM (Garis Kemiskinan Non Makanan).

Nama Kepala Keluarga	Pekerjaan	Pendapatan Perkapita Perhari	Identifikasi Miskin
Mustafa	Pekebun	300,36	-518.34
Piros	Buruh Tani	777,90	-40.80
Jupri	Petani Sewa	528,29	-290.41
Kisran	B.Bangunan	660,36	-158.34
Hasnun	B.Bangunan	528,29	-290.41
Amir	Petani	664,46	-154.24
Anton	Petani Sewa	575,67	-243.03
Dar	Petani Sewa	486,63	-332.07
Mirwan	Buruh Tani	758,71	-59.99
Andi	Buruh Tani	617,11	-201.59
Maudin	Petani Sewa	778,69	-40.01
Husni	Petani Sewa	783,87	-34.83
Anas	Buruh Tani	636,11	-182.59
Sidiq	Buruh Tani	637,84	-180.86
Iwan	Buruh Tani	637,84	-180.86
Wawan	Petani Sewa	531,53	-287.17
Zumran	Buruh Tani	808,74	-9.96
Arwi	Buruh Tani	817,95	-0.75
Masri	Buruh Tani	654,36	-164.34
Aco	Buruh Tani	658,57	-160.13
Fikran	Petani	491,27	-327.43

Lato	Petani	691,09	-127.60
Suadi	Buruh Tani	695,81	-122.89
Lauma	Buruh Tani	708,25	-110.45
Saransa	Buruh Tani	709,72	-108.98
Alimudin	Petani Sewa	733,37	-85.33
Warno	Buruh Tani	733,37	-85.33
Santo	Petani Sewa	744,31	-74.39
Nduli	Buruh Tani	744,97	-73.73
Dani	B.Bangunan	754,09	-64.61
Baco	Petani Sewa	754,09	-64.61
Taufan	Buruh Tani	758,70	-60.00
Taufik	Petani Sewa	637,53	-181.17
Fadli	Petani Sewa	768,95	-49.75
Risman	Petani	644,85	-173.85
Sappara	Petani Sewa	651,13	-167.56
Mujiman	Petani	797,37	-21.33
Said	Petani Sewa	668,41	-150.29
Pendi	Petani Sewa	813,28	-5.42
Darni	Petani Sewa	815,27	-3.43
Aris	Petani Sewa	815,27	-3.43
Hilal	Petani	727,33	-91.37
Darma	Petani	736,45	-82.25

Sumber: Data Primer (diolah) 2018

Tabel di atas menunjukkan kelompok yang teridentifikasi miskin disebabkan tidak dapat memenuhi standar kebutuhan non makanan yang disebut GKNM (Garis Kemiskinan Non Makanan) seperti perumahan, listrik, air, perlengkapan mandi, kesehatan, pendidikan, dan penggunaan BBM (Bahan Bakar Minyak).

Klasifikasi berdasarkan jumlah pengeluaran kelompok keluarga yang diidentifikasi miskin ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Pengeluaran Konsumsi Makanan/Bulan	Jumlah Keluarga
Rp. 54.066-Rp. 79.736	6
Rp. 86.351-Rp. 98.155	13
Rp.98.786 -Rp.132.562	24

Sumber: Data Primer 2018

Jumlah keluarga yang teridentifikasi miskin sebanyak 43 keluarga dengan pengeluaran komoditi non makanan yang

berbeda. Menurut data, ada 6 keluarga yang mengeluarkan Rp. 54.066-Rp. 79.736 untuk komoditi non makanan dalam setiap bulannya dan teridentifikasi miskin karena pengeluaran tersebut belum bisa memenuhi standar kebutuhan non makanan yang dibutuhkan oleh setiap individu. Keluarga yang pengeluaran untuk konsumsi makanannya sebesar Rp. 86.351-Rp. 98.155 setiap bulannya ada sebanyak 13 keluarga yang teridentifikasi miskin karena pengeluaran tersebut belum bisa memenuhi standar kebutuhan komoditi non makanan. Masyarakat Desa Labuan Toposo yang mengeluarkan sebesar Rp.98.786 -Rp.132.562 setiap bulannya juga ada yang teridentifikasi miskin dan tidak lain hal ini disebabkan karena pengeluaran perkapita tidak mampu memenuhi kebutuhan komoditi non makanan dalam setiap individu rumah tangga tersebut.

Kondisi kemiskinan yang terdapat di Desa Labuan Toposo dapat digolongkan sebagai kemiskinan absolut. Menurut BPS (Badan Pusat Statistik, kemiskinan absolut adalah situasi penduduk atau sebagian penduduk yang hanya dapat memenuhi makanan, pakaian, dan perumahan yang sangat diperlukan untuk mempertahankan tingkat kehidupan yang minimum. Kemiskinan ini sesungguhnya menggambarkan situasi kehidupan masyarakat yang miskin secara ekonomi dan hidup jauh di bawah garis kemiskinan serta tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar (sandang pangan dan papan). Seseorang dapat dikatakan miskin jika tidak mampu memenuhi kebutuhan minimum hidupnya untuk memelihara fisiknya agar dapat bekerja penuh dan efisien. Berikut adalah tabel yang menunjukkan kondisi kemiskinan Desa Labuan Toposo.

Merujuk pada tabel berikut yang merupakan kriteria kemiskinan Badan Pusat Statistik (BPS), Desa Labuan Toposo mempunyai penduduk yang mengalami kemiskinan absolut (kemiskinan ekonomi) yang beragam. Dari segi perumahan dapat dilihat pada tabel di atas, penduduk yang

memiliki bahan dasar lantai rumah tanah atau bambu atau kayu kualitas rendah berjumlah 8 (9%) rumah. Sedangkan yang berbahan dasar semen (aci) berjumlah 81 (91%) rumah. Bahan dasar dinding rumah yang memakai bahan bambu atau papan berjumlah 8 (9%) rumah. Sedangkan yang berbahan dasar tembok tanpa plester berjumlah 78 (87,6%) rumah dan rumah yang berbahan dasar batu bata berjumlah 3 (3,37%) rumah. Rumah yang memiliki fasilitas MCK darurat dan bahkan tidak memiliki WC berjumlah 33 (37,1%) rumah. Sedangkan rumah yang memiliki fasilitas MCK berjumlah 56 (62,9%) rumah. Sumber penerangan rumah tangga, yang belum menggunakan listrik berjumlah 10 (11,2%) rumah, dan yang menggunakan listrik 450 watt sebanyak 79 (88,8%) rumah. Jumlah waktu makan dalam sehari ialah yang makan hanya satu atau dua kali sehari berjumlah 72 (80,9%) rumah tangga dan makan tiga kali sehari berjumlah 17 (19,1%) rumah tangga. Indikator selanjutnya yaitu sumber penghasilan kepala rumah tangga sebagai petani berjumlah 11 (9,79%) kepala keluarga (kk), sebagai petani sewa berjumlah 39 (34,7%) kepala keluarga, sebagai buruh tani 36 (32,04%) kepala keluarga, dan sebagai buruh bangunan berjumlah 3 (2,67%) kepala keluarga. Indikator pendidikan akhir kepala keluarga yaitu, tidak bersekolah sebanyak 8 (9%) kepala keluarga, tamat Sekolah Dasar (SD) sebanyak 40 (44,9%) kepala keluarga, tamat SLTP sebanyak 29 (32,6%) kepala keluarga, dan tamat SLTA sebanyak 12 (13,5%) kepala keluarga.

Indikator	Frekuensi	Persentase (%)
Bahan Dasar Lantai rumah		
a.Tanah/Bambu/Kayu kualitas rendah	8	9.0
b. Lainnya misalnya semen (Aci)	81	91.0
Bahan Dasar Dinding Rumah		

a. Bambu/Papan	8	9.0
b. Tembok tanpa plester	78	87.6
c. Lainnya misalnya batu bata	3	3.4
Fasilitas MCK		
a. Tidak memiliki WC (WC darurat)	33	37.1
b. WC bersama tetangga	0	0.0
c. WC sendiri	56	62.9
Sumber penerangan rumah tangga		
a. Tidak memakai Listrik	10	11.2
b. Menggunakan listrik 450 watt	79	84.3
c. Menggunakan listrik 900 watt	0	0.0
Makan dalam sehari		
a. Hanya satu atau dua kali sehari	72	80.9
b. tiga kali sehari	17	19.1
Sumber penghasilan kepala rumah tangga		
a. Petani	11	12.4
b. Petani Sewa	39	43.8
c. Buruh tani	36	40.4
d. Buruh bangunan	3	3.4
Pendidikan terakhir kepala keluarga		
a. Tidak sekolah	8	9.0
b. Tamat SD	40	44.9
c. Tamat SLTP	29	32.6
d. Tamat SLTA	12	13.5

Sumber: *Data Primer Setelah Diolah 2018*

Data yang diperoleh menunjukkan sebanyak 29 keluarga yang bermukim di Desa Labuan Toposo mengalami kemiskinan absolut yang ditunjukkan oleh ketidakmampuan mereka dalam memenuhi kebutuhan komoditi makanan dan komoditi non makanan. Peneliti menemukan bahwa masyarakat Desa Labuan Toposo terdapat

responden atau keluarga yang teridentifikasi miskin pada satu sisi saja baik miskin dari segi konsumsi komoditi makanan saja atau konsumsi komoditi non makanan saja. Perihal ini dapat disebabkan oleh konsentrasi keluarga yang memprioritaskan suatu konsumsi baik makanan ataupun non makanan. Konsumsi komoditi makanan yang kurang dikarenakan pengeluaran keluarga yang sedikit untuk jumlah tanggungan anggota keluarga yang besar dan berakibat pada tidak terpenuhinya kebutuhan kilokalori (kcal) anggota keluarga tersebut. Data yang diperoleh menunjukkan ada 15 keluarga yang mengalami kemiskinan absolut dikarenakan tidak dapat memenuhi kebutuhan komoditi makanan yang dapat diukur melalui kriteria BPS yaitu setiap individu harus memenuhi standar kebutuhan makanan setiap harinya yaitu 1200 kkal (kilokalori). Data juga menunjukkan terdapat 14 keluarga yang tidak mampu memenuhi komoditi non makanan berupa perumahan, listrik, air perlengkapan mandi, biaya kesehatan, biaya pendidikan, dan kebutuhan BBM (Bahan Bakar Minyak).

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. Masyarakat Desa Labuan Toposo sebagian besar menggantungkan hidupnya pada sektor pertanian baik itu menjadi petani ataupun buruh tani. Pada penelitian ini masyarakat Desa Labuan Toposo masih ada yang hidup di bawah garis kemiskinan.
2. Hasil dari perhitungan terhadap data-data yang diperoleh menyatakan bahwa, garis kemiskinan makanan adalah Rp.7.065 perkapita per hari dan garis kemiskinan non makanan adalah Rp.818.7 perkapita per hari. Penelitian ini mencatat ada 29 keluarga yang teridentifikasi miskin baik dari sisi konsumsi komoditi makanan (garis kemiskinan makanan) dan konsumsi komoditi non makanan (garis kemiskinan non makanan). Peneliti menemukan bahwa masyarakat Desa Labuan Toposo terdapat

responden atau keluarga yang teridentifikasi miskin pada satu sisi saja baik miskin dari segi konsumsi komoditi makanan saja atau konsumsi komoditi non makanan saja. Perihal ini dapat disebabkan oleh konsentrasi keluarga yang memprioritaskan suatu konsumsi baik makanan ataupun non makanan. Jumlah responden (keluarga) yang mengalami kemiskinan komoditi makanan saja ada 15 Keluarga, dan jumlah responden (keluarga) yang mengalami kemiskinan komoditi non makanan saja ada 14 keluarga.

3. Pada penelitian ini juga dapat diketahui kondisi kemiskinan absolut yang ada di Desa Labuan Toposo. Masih adanya rumah yang berbahan dasar papan yang sudah lapuk dan belum mempunyai tempat pembuangan atau MCK yang layak pakai. Masih adanya masyarakat yang mencuci pakaian pada saluran selokan yang memang memiliki air yang jernih, tapi merupakan bukti bahwa saluran sanitasi yang baik dan tertib. Sumber penerangan rumah sebagian masyarakat Desa Labuan Toposo ada yang belum bisa menikmati listrik dan ada juga yang masih menyambung dengan listrik dari rumah lain.

Saran

1. Pemerintah diharapkan untuk dapat memberikan penanganan lebih lanjut agar dapat menekan angka garis kemiskinan sehingga masyarakat Desa Labuan Toposo tidak ada lagi yang hidup di bawah garis kemiskinan. Contoh konkrit yang dapat dilakukan oleh pemerintah adalah bukan hanya bantuan berupa materi tapi juga bantuan berupa non materi seperti sosialisasi usaha alternatif yang dapat dilakukan di perdesaan dan pelatihan khusus pada keterampilan-keterampilan yang diminati.
2. Pemerintah diharapkan dapat memberikan bantuan untuk masyarakat demi mendapatkan hunian yang layak terutama

sarana sanitasi yang masih kurang pada masing-masing rumah tangga yang terkadang ada beberapa rumah tangga yang tidak memiliki sarana pembuangan sendiri, bahkan mempunyai sarana pembuangan darurat yang diletakkan di depan rumahnya.

DAFTAR RUJUKAN

- Djojohadikusumo, S. 1985. *Perdagangan Industri dalam Pembangunan*. Jakarta: LP3ES.
- Dumairy. 1996. *Perekonomian Indonesia*. Jakarta: Erlangga.
- Haughton, Jonathan dan Khandker, Shahidur R. 2012. *Pedoman Tentang Kemiskinan dan Ketimpangan*. Diterjemahkan oleh: Tim Penerjemah World Bank. Jakarta: Salemba Empat.
- Jhingan, M.L. 2007. *Ekonomi Pembangunan Dan Perencanaan*. Jakarta: Raja Garafindo Persada.
- Lubis, Todung Mulya. 1986. *Bantuan Hukum dan Kemiskinan Struktural*. Jakarta: Rajawali Grafiti.
- Palampanga, Anhulaila M., 2011. *Kemiskinan Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa*. Palu: Lembaga Pengkajian Pembaharuan Hukum Dan Kebijakan Publik (LP2HKP).
- Soekartawi. 1995. *Analisis Usaha Tani*. Jakarta: UI-Press.
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta.
- Tambunan, Tulus TH. 2001. *Perekonomian Indonesia: Teori dan Temuan Empiris*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Todaro, Michael P. 2003. *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga*. Jakarta: Erlangga.
- Umar, Husein. 2003. *Metodologi Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*. Jakarta : PT. Gramedia Pustaka.

Yustika, Ahmad Erani. 2002. *Pembangunan dan Krisis: Memetakan Perekonomian Indonesia*. Jakarta:PT. Grasindo.